ABSTRAK

Muhammad Husni Thamrin, Nim 105261100818, 2022. *Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pembimbing; Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. dan Rapung, Lc., M.H.I.

Kata kunci: Jalan umum, Secara Pribadi, Hukum Islam

Jalanan umum merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang. Namun, terkadang jalan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti acara pernikahan, kematian, dan lain-lain. Fenomena yang lain juga, tidak sedikit kasus di mana ada orang yang punya mobil tetapi tidak punya garasi sehingga mereka memarkirnya di bahu jalan. hal ini membuat jalanan menjadi macet serta membuat halangan dan kesusahan bagi pengguna jalan. Kajian ini difokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum secara pribadi dan pandangan hukum normatif tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum secara pribadi? 2) Bagaimana prosedur resmi yang digunakan masyarakat apabila ingin menggunakan jalan umum secara pribadi?

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan melalui riset berbagai literatur berupa artikel online maupun buku-buku. Literatur yang dikaji berkaitan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Di dalam literatur-literatur tersebut ditemukan berbagai pendapat yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan jalan umum secara pribadi menurut pandangan hukum Islam secara umum (hukum asal) tidak diperbolehkan. Dalam beberapa kasus, Islam membolehkan penggunaan jalan umum secara pribadi dengan beberapa syarat, yaitu menyisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Syarat lainnya, sudah memperoleh izin dari pemerintah.. Apabila masyarakat ingin menggunakan jalan untuk suatu hajatan, prosedur resmi yang dapat mereka tempuh adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.